

***Resistor Factor Implementation Guidance and Counseling
Program in High School of The Metro city
Esty Ratna Sari (estyratna@gmail.com)¹
Di bawah bimbingan Giyono²
Shinta Mayasari³***

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors inhibiting the implementation of a guidance and counseling program. The method used in this research is descriptive method. Data collecting techniques use questionnaires implementation guidance and counseling services. The samples in this study were 22 teachers guidance and counseling. The research problem is the implementation of the guidance and counseling program is not optimal. The issue is whether the limiting factor in the implementation of guidance and counseling programs in high schools in the Metro city. These results indicate that there are several factors that inhibiting guidance and counseling program implementation: (1) preparation and counseling program is not in accordance with the basic aspects of guidance and counseling program. (2) educational background does not fit with the profession as a teacher guidance and counseling. (3) Facilities and infrastructure are the most dominant factors inhibiting the implementation of the service is to be guidance and counseling. (4) Lack of cooperation between service delivery personnel guidance and counseling school.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling (BK). Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BK belum optimal. Adapun permasalahannya adalah apakah faktor penghambat pelaksanaan program BK pada SMA Negeri se-Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sampel dalam penelitian ini adalah 22 guru BK. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program BK, yaitu; (1) Penyusunan program BK belum sesuai dengan aspek-aspek dasar penyusunan program BK. (2) Latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan profesi sebagai guru BK. (3) Sarana dan prasarana adalah faktor dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan layanan BK. (4) Kurangnya kerja sama antar personalia pelaksanaan layanan BK disekolah.

Kata Kunci : Bimbingan Konseling, Faktor Penghambat, Pelaksanaan Program

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1991 diharapkan pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan yaitu *guru pembimbing/konselor* dengan rasio satu orang guru pembimbing/konselor untuk 150 orang siswa. Sukardi (2008:96) Oleh karena itu kekhususan bentuk tugas dan tanggung jawab guru pembimbing/konselor sebagai suatu profesi yang berbeda dengan tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban tugas atau penghargaan jam kerja guru pembimbing ditetapkan 36jam/minggu, beban tugas (Sukardi, 2008:97) tersebut meliputi: (1) *Kegiatan penyuluhan program pelayanan* dalam bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung; (2) *Kegiatan melaksanakan pelayanan* dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung; (3) *Kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan* dalam bimbingan pribadisosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung. Agar terperinci dan tepat sasaran seorang guru bimbingan dan konseling harus menyusun program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling adalah program yang tertuju pada apa yang ingin dicapai dari tujuan bimbingan sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Didalam program bimbingan dan konseling tercantum beberapa unsur yang harus dipenuhi. Apabila program bimbingan telah tersusun dengan seksama, maka persoalannya adalah bagaimana melaksanakan program tersebut. Untuk melaksanakan program bimbingan perlu diperhatikan beberapa unsur pokok (Aqib, 2012) seperti berikut: (a) prinsip-prinsip pencatatan administrasi program bimbingan. Dalam menata dan menjelaskan administrasi program bimbingan di sekolah ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Program bimbingan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; (2) Program bimbingan harus merupakan program terpadu dalam keseluruhan program pendidikan sekolah; (3) Setiap petugas bimbingan mempunyai peran sesuai dengan sifat dan kemampuan fungsional di sekolahnya; (4) Tanggung jawab penyelenggara program bimbingan ada di tangan kepala sekolah; (5) Program bimbingan diorganisasikan secara sederhana, untuk memelihara pelaksanaannya; (6) Perlu adanya struktur organisasi vertikal yang sesuai. (b) Pola organisasi bimbingan, program bimbingan dapat dilaksanakan melalui pola organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan di sekolah yang bersangkutan. Ada tiga pola organisasi yang dapat dilaksanakan: (1) pola organisasi, di mana pelayanan

bimbingan dilaksanakan oleh semua staf sekolah sebagai bagian dari tugas reguler yang diterimanya: (2) Pola organisasi, di mana program bimbingan dilaksanakan lebih terinci, telah disediakan waktu dan pelayanan khusus; (3) Pola organisasi yang biasa disebut “program guru penyuluh” biasanya dilakukan di sekolah menengah. Adapun tujuan dari penyusunan program bimbingan dan konseling tidak lain adalah agar pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien. Meskipun secara konseptual sebuah pelaksanaan program sangat menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan, namun dalam pelaksanaannya beberapa guru pembimbing sekolah sering mengabaikan keberadaan program bimbingan dan konseling. Hal ini terlihat dari observasi awal pada saat penulis melakukan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat banyaknya guru pembimbing di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas negeri di daerah yang bukan lulusan dari studi bimbingan dan konseling. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang saya laksanakan, ada beberapa guru pembimbing yang menyusun program tidak mengacu pada kebutuhan dari tiap lapisan sekolah, baik siswa maupun staf pengajar dan kepala sekolah. Artinya aktivitas yang dilakukan tidak mengacu pada program yang disusunya. Ada beberapa alasan program bimbingan dan konseling yang disusun tidak dijadikan bahan acuan kegiatan, yaitu program yang disusun semata-mata dilatar belakangi oleh kepentingan administrasi, program tidak disusun berdasarkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan siswa, program yang disusun kurang mempertimbangkan kondisi sekolah.

PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

Giyono (2010:38) program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, yakni periode bulanan, semester dan tahunan. Secara khusus Soetjipto dan Kosasi (2007:97) mengungkapkan secara garis besar program bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama hendaknya berorientasi kepada:

- a. Bimbingan belajar, karena cara belajar di sekolah menengah pertama berbeda sekali dengan di sekolah dasar.
- b. Bimbingan tentang hubungan muda-mudi, karena pada usia ini mereka mulai mengenal hubungan cinta kasih.

c. Pada usia ini mereka mulai membentuk kelompok sebaya (*peer group*) maka hendaknya program bimbingan konseling juga menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial.

d. Bimbingan yang berorientasi pada tugas-tugas perkembangan anak usia 12-15 tahun.

e. Bimbingan karir baik yang menyangkut pemahaman tentang dunia pendidikan ataupun pekerjaan.

Dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling adalah keseluruhan rencana kegiatan yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan pada periode tertentu. Dalam hal ini periode tertentu yakni periode harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan periode tahunan. Pelaksanaan program bimbingan konseling yang sesuai dengan periode-periode tersebut akan membuat pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling berkesinambungan. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari suatu sistem di sekolah dan mengandung makna bahwa program bimbingan konseling bukan berarti program milik guru bimbingan dan konseling sekolah sendiri tetapi lebih dari itu, program bimbingan dan konseling merupakan milik semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Program tersebut mengandung unsur-unsur yang terdapat di dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling dan berorientasikan pada pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

Giyono (2010:51-52) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program bimbingan konseling perlu diperhatikan beberapa unsur pokok, diantaranya:

a. Prinsip-prinsip pencatatan administrasi program bimbingan. Dalam menata dan menjalankan administrasi program bimbingan dan konseling di sekolah ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan beberapa unsur pokok seperti berikut; (1)Program bimbingan dan konseling hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Setiap daerah atau sekolah memiliki kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda. (2)Program bimbingan harus merupakan program terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah, sehingga pelaksanaannya juga terkoordinasi dengan kegiatan sekolah lainnya. (3)Setiap petugas bimbingan dan konseling mempunyai peranan sesuai dengan sifat dan kemampuan fungsional disekolahnya. (4)Tanggung jawab penyelenggaraan program bimbingan ada ditangan kepala sekolah

b. Pola organisasi bimbingan dan konseling Program bimbingan dapat dilaksanakan melalui pola organisasi yang berbedabeda sesuai dengan keadaan sekolah yang bersangkutan serta kemampuan tenaga, biaya, dan kesempatan yang tersedia di sekolah yang bersangkutan. Ada tiga pola organisasi yang dapat dilaksanakan, ialah sebagai berikut; (1)Pola organisasi, dimana pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh semua staf sekolah sebagai bagian dari tugas regular yang diterimanya. (2)Pola organisasi, dimana program bimbingan dan konseling dilaksanakan lebih terinci telah disediakan waktu khusus untuk melaksanakan layanan bimbingan dengan pelayanan khusus pula. (3)Pola organisasi yang biasa disebut “Program Guru Penyuluhan” (*Teacher Counselor Program*) biasanya dilakukan di sekolah menengah. Pola ini merupakan campuran dari pola pertama dan kedua.

Giyono (2010:42) untuk kelancaran program bimbingan dan konseling perlu disediakan anggaran biaya yang memadai untuk pos-pos pembiayaan personal, pengadaan dan pengembangan alat-alat teknis, biaya oprasional, dan biaya riset.

Kartini Kartono (1985:108) mengungkapkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling, kesukaran, persoalan dapat disebabkan oleh berbagai hal dan sumber seperti;

1. Perhitungan, pengetahuan, dan dugaan perencanaan sehubungan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan program (menentukan permasalahan apa yang dihadapi anak didik, sumber-sumber persoalan itu) serta isi program bimbingan konseling.
2. Fasilitas bagi penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling (sarana dan prasarana).
3. Kemampuan petugas (latar belakang pendidikan).
4. Konsep petugas bimbingan dan konseling, petugas bimbingan dan konseling mempunyai peranan sesuai dengan sifat dan kemampuan fungsional disekolah (guru mata pelajaran, staf Administrasi, wali kelas, kepala sekolah)

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta dari suatu fenomena yang terjadi . Nazir (2009:54), yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang.

SAMPEL

Sampel adalah “sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti dengan menggunakan cara-cara tertentu”. (Arikunto, 2006:117). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-Kota Metro, yang terdiri dari 22 orang guru Bimbingan dan Konseling.

VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini mempunyai satu variabel yaitu faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang membuat layanan bimbingan konseling tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan optimal sesuai dengan program bimbingan konseling yang telah tersusun secara sistematis. Indikator faktor yang menjadi penghambat layanan bimbingan dan konseling meliputi; (1) Dasar penyusunan program dan isi program, (2) Sarana dan prasarana, (3) Kemampuan petugas (latar belakang pendidikan), (4) Petugas bimbingan dan konseling mempunyai peranan sesuai dengan sifat dan kemampuan fungsional di sekolah (guru mata pelajaran, staf Administrasi, wali kelas, kepala sekolah)

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket pelaksanaan program BK. Angket ini dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data tentang faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan konseling di SMA Negeri Se-Kota Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah tersebut. Hasil wawancara berupa data tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dimaksud untuk mencari dan meneliti bahan-bahan tertulis yang tercatat dalam arsip yang menyangkut pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Peneliti akan mericek data-data dan arsip-arsip penunjang pelaksanaan bimbingan konseling serta kelengkapan inventaris bimbingan konseling di sekolah seperti; program-program bimbingan dan konseling (program tahunan, semesteran, bulanan dan harian, buku siswa, arsip tentang masalah siswa).

PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN

VALIDITAS INSTRUMEN

Validitas dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (*construct validity*). Untuk menguji validitas konstruk (*construct validity*) digunakan pendapat dari para ahli (*experts judgment*).

REALIBILITAS INSTRUMEN

Untuk menguji reliabilitas instrument dan mengetahui tingkat reliabilitas instrument dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus alpha menggunakan program SPSS 17.0. Setelah dilakukan perhitungan uji reliabilitas, diperoleh tingkat reliabilitas yaitu $r_{hitung} = 0,947$. Berdasarkan kriteria reliabilitas yang telah dikemukakan oleh Basrowi dan Kasinu di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat reliabilitas angket adalah sangat tinggi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus prosentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

N

Keterangan :

P : besarnya persentasi

F : jumlah skor/jawaban yang diperoleh dari seluruh item

N : jumlah perkalian seluruh item dengan responden. (Ali, 1985:184).

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Tabel. Rekapitulasi Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling pada SMA Negeri se-Kota Metro Tahun Pelajaran 2012/2013.

No. Indikator Porsentase

1. Dasar penyusunan program dan isi program. **17 %**
2. Sarana dan prasaranan. **33%**
3. Kemampuan petugas (latar belakang pendidikan). **20%**
4. Petugas bimbingan dan konseling mempunyai peranan sesuai dengan sifat dan kemampuan fungsional disekolah (guru mata pelajaran, staf Administrasi, wali kelas, kepala sekolah) **30%**

Selanjutnya penjelasan mengenai deskripsi setiap indikator mengenai faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut :

1. Dasar penyusunan program bimbingan dan konseling

Dasar penyusunan program bimbingan dan konseling adalah dasar-dasar atau landasan yang digunakan dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Sedangkan dasar untuk penyusunan program BK menurut Prayitno, (1998) (1) Program BK harus disusun berdasarkan kebutuhan dari para siswanya, (2) Mempunyai tujuan yang ideal tetapi juga realistik dalam pelaksanaannya, (3) Melibatkan semua tenaga kependidikan di sekolah tersebut, (4) Program BK harus sistematis, lengkap menyeluruh, terbuka dan luwes, (5) Mempunyai Peranan untuk memadukan antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Isi program bimbingan dan konseling adalah isi dari program bimbingan dan konseling. Bidang-bidang bimbingan, (a) Bimbingan pribadi; (b) bimbingan sosial; (c) bimbingan belajar; (d) bimbingan karir.

Jenis-jenis layanan BK, (a) Orientasi; (b) Informasi; (c) Penempatan/penyaluran; (d) Pembelajaran; (e) Konseling perorangan; (f) Konseling kelompok; (g) Bimbingan kelompok; (h) Mediasi. Kegiatan pendukung BK, (a) Aplikasi instrumen; (b) Himpunan data; (c) Konferensi kasus; (d) Kunjungan rumah; (e) Alih tangan. Pada rekapitulasi faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling dasar penyusunan dan isi program memiliki tingkat prosentase 17%.

2. Sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan program bimbingan konseling tidak terlepas dari fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling diantaranya ruang bimbingan dan konseling Pada rekapitulasi faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sarana dan prasarana memiliki tingkat prosentase 33%, yang artinya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada SMA Negeri di Kota Metro sarana prasarana adalah salah satu faktor yang banyak menjadi penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Giyono (2010:42) untuk kelancaran program bimbingan dan konseling perlu disediakan anggaran biaya yang memadai untuk pos-pos pembiayaan personal, pengadaan dan pengembangan alat-alat teknis, biaya operasional, dan biaya riset.

Sukardi (2008:98) untuk kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik, mutlak diperlukan ruangan khusus dengan perlengkapan yang memadai dan nyaman, meskipun wujudnya sangat sederhana, ciri-ciri ruang guru bimbingan dan konseling/konselor diantaranya adalah sebagai berikut: (1)ruang bimbingan dan konseling itu harus menyenangkan dan nyaman dalam arti tidak terkesan sama dengan situasi kelas, kantor atau pengadilan; (2) ruang bimbingan dan konseling ditata sedapat mungkin bersifat artistik, sederhana, selalu dalam keadaan yang bersih dan rapi; (3)ruang bimbingan dan konseling ditata sedemikian rupa sehingga peserta didik dan guru bimbingan dan konseling dalam keadaan yang rileks, tenang dan damai; (4)ruang bimbingan dan konseling hendaknya mendapat penerangan atau sinar yang cukup, ventilasi yang cukup memadai; (5)ruang bimbingan dan konseling hendaknya tidak terganggu oleh suasana keributan di luar ruangan. Menurut Sukardi untuk kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik, mutlak diperlukan ruangan khusus dengan perlengkapan yang memadai dan nyaman, namun fakta di lapangan masih ada beberapa SMA Negeri yang telah memiliki ruang bimbingan dan konseling, namun masih jauh dari kata nyaman. Ruang bimbingan dan konseling tidak dalam keadaan yang rapi, ruang bimbingan dan konseling yang ada dipenuhi meja dan kursi untuk guru bimbingan dan konseling, tidak ada ruangan khusus untuk melaksanakan konseling individual maupun konseling kelompok.

3. Kemampuan Petugas (latar belakang pendidikan)

Kemampuan petugas (latar belakang pendidikan) adalah kemampuan guru bimbingan dan konseling yang didapat dari latar belakang pendidikannya, berasal dari lulusan bimbingan dan konseling atau tidak. Pada rekapitulasi faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling personalia pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling memiliki tingkat prosentase 20%. Giyono (2010:41) Untuk menjadi guru bimbingan dan konseling atau konselor senior, hendaknya dipersyaratkan seorang sarjana dari jurusan bimbingan dan konseling atau psikologi pendidikan yang ditambah praktik dalam layanan bimbingan dan konseling disekolah. Sedangkan untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor muda , setidaknya sarjana muda, D3 Bimbingan dan Konseling, dan untuk guru pembantu konselor, adalah guru yang berijazah atau sarjana muda kependidikan dari lembaga Bimbingan dan Konseling.

Pada saat penelitian berlangsung, ada salah seorang guru bimbingan dan konseling di satu SMA yang menyatakan, bila ada satu guru yang dari awal menjabat menjadi guru bimbingan

dan konseling, tidak pernah satu kali saja membuat program bimbingan dan konseling, karena guru tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.

Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru bimbingan dan konseling yang tidak berlatar belakang pendidikan dari bimbingan dan konseling, cenderung mengalami kesulitan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, karena mereka tidak memiliki dasar keilmuan yang sesuai. Ada beberapa layanan yang tidak terdapat dalam program, dan ada juga yang hanya mengkopas program dari teman satu profesi.

Sukardi (2008:96) sesuai dengan keputusan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaiaan Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomer 25 Tahun 1991 diharapkan pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konselin/konselor dengan rasio satu orang guru bimbingan dan konseling untuk 150 orang siswa (1:150).

4. Petugas bimbingan dan konseling mempunyai peranan sesuai dengan sifat dan kemampuan fungsional disekolah (guru mata pelajaran, staf Administrasi, wali kelas, kepala sekolah)

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling tidak mungkin bisa melaksanakan semua tanggung jawabnya sendiri. Perlu ada kerja sama antara personalia pelaksanaan layanan. Personalia pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah personalia yang membantu guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Personalia yang dimaksud adalah kerjasama antar guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran, wali kelas, staf TU dan kepala sekolah. Semua personalia memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada rekapitulasi faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling personalia pelaksanaan program bimbingan dan konseling memiliki tingkat, prosentase 30%, yang artinya ada beberapa SMA Negeri di Kota Metro yang personalia pelaksanaan layanan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik seperti yang ada pada Tabel 2.1. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Personal Bimbingan dan Konseling (Aqib 2012 :114 -118)

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapat mengenai faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kota Metro tahun pelajaran 2012/2013.

1. Sesuai dengan hasil penelitian dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, ada beberapa SMA yang dalam menyusun program tidak didasarkan aspek-aspek dasar penyusunan program dan isi program bimbingan dan konseling tidak lengkap.
2. Sarana dan prasarana adalah faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada SMA Negeri di Kota Metro. Sarana dan prasarana yang tidak lengkap bahkan tidak ada.
3. Latar belakang pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
4. Dalam penelitian juga dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kota Metro adalah kurangnya kerja sama antar personalia pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling disekolah, personalia pelaksanaan layanan cenderung kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka saran yang dapat diajukan yaitu :

1. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling diharapkan bisa menyusun program bimbingan dan konseling sesuai dengan aspek penyusunan program bimbingan dan konseling agar pelaksanaan program bimbingan dan konseling lebih optimal.

2. Kepada Pihak Sekolah

Diharapkan dapat lebih mendukung guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan setiap kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini terutama kepala sekolah lebih memberikan dukungan terutama dalam pengadaan semua fasilitas yang mendukung keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling.

3. Kepada Dinas Pendidikan

Diharapkan bisa mengontrol tenaga pendidik yang ada disekolah agar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, karena proses pembelajaran akan berjalan lebih optimal bila guru

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesinya terutama untuk guru bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 1985. Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Bandung: Sinar Baru
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Aqib, Zainal. 2012. *Ikhtisar Bimbingan & Konseling di Sekolah*. Bandung : Yrama Widya.
- Basrowi dan Kasinu. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Kediri: Jengala Pustaka Utama
- Giyono. 2010 . *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. FKIP Universitas Lampung.
- Kartono, Kartini. 1985. *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*. Jakarta : CV Rajawali.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghaalia Indonesia.
- Prayitno & Erman Amti. 1999. *Dasar – dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soetjipto dan Kosasi, R. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.